



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik, Lantai 2 Jl. Jend. Sudirman
KUALA TUNGKAL

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : INSPEKTORAT	Di Terima Tgl : 9 NOV 2023
No. Surat : 700.1.2.1/383/ISP/2023	No. Agenda : 631
Tgl Surat : 14 NOV 2023	Sifat : - Sangat/ Biasa/ Segera/ Penting
Perihal : Laporan hasil reviu	
Diteruskan Kepada Sdr. : 1. Sekretaris 2. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim & Promosi Penanaman Modal 3. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal & Sistem Informasi 4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan 5. Bidang Pengaduan, Kebijakan & Pelaporan Layanan	Dengan Hormat Harap : <i>Kep. Tu.</i> <i>Ameh Louwari</i> <i>14/11/23</i> <i>"</i>
Catatan yth. Nurmah vth dicursipkan sudah selesai dif.kopikan - Rita - Pak Dian 14/11/2023	Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat <u>AHMAD HUSAINI, SE</u> Penata TK.I Nid. 19750529 201001 1 007

Diteruskan kpd yth. Bpk. Kadis PMPSP 9/11/2023

ATAS
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Pelabuhan Kode Pos 36512 Telp. (0742) 21238 E-mail: itkabtjb@gmail.com

Website: <http://inspektorat.tanjabbarkab.go.id/>

KUALA TUNGKAL



LAPORAN HASIL REVIU

ATAS
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

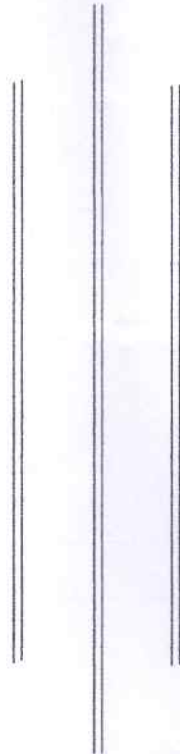
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Pelabuhan Kode Pos 36512 Telp. (0742) 21238 E-mail: itkabtjb@gmail.com

Website: <http://inspektorat.tanjabbarkab.go.id/>

KUALA TUNGKAL



LAPORAN HASIL REVIU

ATAS
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Pelabuhan Kuala Tungkal Kode Pos 36512 Telp. (0742) 21238

E-mail: itkabtjb@gmail.com Website: <http://inspektorat.tanjabbarkab.go.id/>

**LAPORAN HASIL REVIU
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : 700.1.2.1/382/ISP/2023
TANGGAL : 14 September 2023**

Daftar Isi	Halaman
I. Ringkasan Eksekutif	2
II. Dasar Hukum	2
III. Tujuan Reviu	3
IV. Ruang Lingkup Reviu	3
V. Metodologi Reviu	4
VI. Gambaran Umum	4
VII. Uraian Hasil Reviu	8
VIII. Rekomendasi	8
IX. Apresiasi	9

Lampiran:

Catatan Hasil Reviu (CHR)

LAPORAN HASIL REVIU RKA-SKPD

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TAHUN ANGGARAN 2024

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD, dengan berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah. Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama Kepala Daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya Kepala Daerah berdasarkan nota kesepakatan menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
2. Sesuai instruksi pimpinan, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan Reviu RKA-SKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024. Adapun reviu dilaksanakan setelah penyusunan RKA oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan menindaklanjuti Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 900/228/BKAD/2023 tanggal 16 Juli 2023 perihal Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada alokasi anggaran belanja daerah RKA SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diketahui pada belanja operasi dan belanja modal belum dilengkapi dengan dokumen *Term Of Reference* (TOR)/KAK per sub kegiatan.
2. Ada belanja pemeliharaan yang jumlahnya belum berpedoman pada Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.
3. Ada belanja modal yang jumlahnya belum berpedoman pada Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.
4. Terdapat 7 jenis belanja di alokasikan pada beberapa sub kegiatan.

Dari hasil reviu tersebut di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disarankan untuk melakukan perbaikan sesuai hasil reviu.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
5. Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/1329/IJ tentang penyampaian petunjuk teknis pelaksanaan reviu dokumen perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2023.
6. Surat Edaran Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 910/1627/SE/BKAD/2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Pada APBD Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 81/Kep.Bup/Isp/2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;
8. Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 900/228/BKAD/2023 tanggal 16 Juli 2023 perihal Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Tahun Anggaran 2024;
9. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 800.1.11.1/312/SPT/2023 tanggal 22 Agustus 2023 untuk Melakukan Reviu terhadap Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2024.
10. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 800.1.11.1/531/SPT/2023 tanggal 01 September 2023 untuk Melakukan Lanjutan Reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

III. TUJUAN REVIU

Tujuan dari dilaksanakannya reviu RKA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2024 adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi RKA-SKPD sesuai dengan RKPDP, RENJA-SKPD, dan KUA-PPAS serta kesesuaian dengan standar biaya, kaidah-kaidah penganggaran dan dilengkapi dokumen pendukung RKA-SKPD.

IV. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup reviu adalah pengujian atas penyusunan dokumen RKA-SKPD. Ruang lingkup reviu mencakup pengujian terbatas atas dokumen sumber, namun tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

V. METODOLOGI REVIU

1. Reviu RKA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/1329/IJ Tahun 2022 tentang Penyampaian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Tahun 2023;
2. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah serta wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait proses penyusunan RKA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2024;
3. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 800.1.11.1/312/SPT/2023 tanggal 22 Agustus 2023, dengan susunan tim sebagai berikut:

No.	Nama	NIP	Jabatan dalam Tim
1	Drs. Encep Jarkasih	19701201 199009 1 001	Penanggungjawab
2	Eko Suwello, ST	19741022 200501 1 010	Wakil Penanggungjawab
3	Drs. Winarto	19640810 199503 1 001	Pengendali Teknis
4	Wiwied WD, S.Farm, Apt, MPH.	19821004 201101 2 006	Ketua Tim
5	Ade Hodri, SP	19711025 200604 1 003	Anggota Tim
6	Heri Cahyono, SE	19791026 201502 1 001	Anggota Tim
7	Nuria Ningsih, A.Md	19740430 200501 2 007	Anggota Tim
8	Piska Haryani, SH	19900413 201502 2 002	Anggota Tim
9	Saribanun	19720602 199402 2 003	Anggota Tim
10	Ahmad Ridwan, S.M	19760804 200701 1 027	Anggota Tim

Reviu RKA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan mulai tanggal 22 Agustus s.d 08 September 2023.

VI. GAMBARAN UMUM

1. Proses Penyusunan RKA-SKPD

Berdasarkan nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD, TAPD menyiapkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam Menyusun, merumuskan dan mensinkronkan serta menjamin keselarasan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan secara adil dan merata dengan memperhatikan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Mekanisme Penyusunan RKA-SKPD Berdasarkan Pagu Anggaran SKPD.

Sesuai dengan Surat Edaran Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 910/1627/SE/BKAD/2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Pada APBD Tahun Anggaran 2024, maka setiap SKPD melakukan langkah-langkah dalam penyusunan RKA-SKPD sebagai

- 1) Menyusun RKA-SKPD untuk APBD Tahun Anggaran 2024 dan menginput RKA-SKPD tersebut melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dengan berpedoman pada prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabel.
- 2) Penyusunan RKA-SKPD harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 yang telah disepakati Bersama antara Bupati Tanjung Jabung Barat dan DPRD Tanjung Jabung Barat dengan mempedomani pada :
 - a. Indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, keluaran dan hasil.
 - b. Tolak Ukur Kinerja yang menjadi Ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dengan mempertimbangkan factor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program/kegiatan/sub kegiatan.
 - c. Sasaran Kinerja dari Program atau Kegiatan/Sub Kegiatan yang akan dicapai.
 - d. Standar Satuan Harga (SSH), Kode Rekening Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Daerah, serta Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang telah ditetapkan.
 - e. Standar Pelayanan Minimal yang merupakan tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara Minimal.
- 3) Struktur anggaran sementara pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang tercantum pada KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 yang telah disepakati, menjadi batasan pagu tertinggi dalam penyusunan RKA-SKPD.
- 4) Alokasi plafon anggaran sementara belanja per-SKPD sesuai dengan program, kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 yang telah disepakati, menjadi Batasan pagu tertinggi dalam penyusunan RKA-SKPD.
- 5) RKA-SKPD Tahun Anggaran 2024 yang telah ditanda tangani Kepala SKPD disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat c.q.Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada **paling lambat tanggal 11 Agustus 2023**.
- 6) Kepala SKPD bertanggung jawab sepenuhnya secara administrasi, teknis dan fisik terhadap keseluruhan materi RKA-SKPD pada APBD Tahun Anggaran 2024 yang disusun.

3. Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran, yaitu:

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Belanja (Rp)				Jumlah
						Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
2	18	02	2,01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
2	18	02	2,01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	10.100.000				10.100.000
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
2	18	03	2,01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
2	18	03	2,01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	80.100.000				80.100.000
2	18	03	2,01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000				50.000.000
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
2	18	04	2,01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					
2	18	04	2,01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	27.350.000				27.350.000
2	18	04	2,01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	35.673.000				35.673.000
2	18	04	2,01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	27.350.000				27.350.000
2	18	04	2,01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	19.026.800				19.026.800
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
2	18	05	2,01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
2	18	05	2,01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	9.632.000				9.632.000
2	18	05	2,01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	24.000.000				24.000.000
2	18	05	2,01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	7.500.000				7.500.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
2	18	06	2,01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
2	18	06	2,01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	13.568.000				13.568.000
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
2	18	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
2	18	01	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.084.000				27.084.000
2	18	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
2	18	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.214.672.689				3.214.672.689
2	18	01	2,02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	151.320.000				151.320.000
2	18	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
2	18	01	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35.750.000				35.750.000
2	18	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					
2	18	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.399.000				7.399.000
2	18	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.748.600				65.748.600
2	18	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.900.000				33.900.000
2	18	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.182.800				19.182.800
2	18	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.800.000				13.800.000
2	18	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310.278.950				310.278.950
2	18	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
2	18	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000	5.000.000			50.000.000
2	18	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
2	18	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000				2.000.000
2	18	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	625.560.000				625.560.000
2	18	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
2	18	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.320.000				76.320.000
2	18	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.112.000				47.112.000
2	18	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.700.000				30.700.000
2	18	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.025.000				50.025.000
Jumlah						5.060.152.839	5.000.000			5.065.152.839

VII. URAIAN HASIL REVIU

Berdasarkan hasil reviu ditemukan kondisi sebagai berikut:

5. Pada alokasi anggaran belanja daerah RKA SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diketahui pada belanja operasi dan belanja modal belum dilengkapi dengan dokumen *Term Of Reference* (TOR)/KAK per sub kegiatan.
6. Ada belanja pemeliharaan yang jumlahnya belum berpedoman pada Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.
7. Ada belanja modal yang jumlahnya belum berpedoman pada Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.
8. Terdapat 7 jenis belanja di alokasikan pada beberapa sub kegiatan.

VIII. REKOMENDASI

Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat merekomendasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar:

1. Melengkapi dokumen pendukung RKA SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2024 dengan *Term Of Reference* (TOR) per sub kegiatan, sehingga penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai tergambar dengan jelas.
2. Anggaran belanja pemeliharaan jumlahnya berpedoman pada Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.
3. Anggaran belanja modal jumlahnya berpedoman pada Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

4. Menyatukan belanja-belanja yang sejenis kedalam kegiatan yang relevan, agar tercapai efektifitas dari penganggaran yang berdampak pada efisiensi belanja non operasional.

IX. APRESIASI

Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Reviu RKA-SKPD Tahun Anggaran 2024.

INSPEKTUR DAERAH,

Drs. ENCEP JARKASIH
Pembina Utama Muda
NIP. 19701201 199009 1 001



**CATATAN HASIL REVIU
ATAS RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN 2024**

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 800.1.11.1/312/SPT/2024 tanggal 22 Agustus 2023 untuk Melakukan Reviu Terhadap Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut:

DATA UMUM

Pagu Anggaran Tahun 2024 pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** sebesar **Rp5.065.152.839** dengan alokasi per sumber dana dan jenis belanja sebagai berikut :

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Belanja				Jumlah
						Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
2	18	02	2,01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
2	18	02	2,01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	10.100.000				10.100.000
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
2	18	03	2,01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
2	18	03	2,01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	80.100.000				80.100.000
2	18	03	2,01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000				50.000.000
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
2	18	04	2,01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Belanja				Jumlah
						Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
2	18	04	2,01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	27.350.000				27.350.000
2	18	04	2,01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	35.673.000				35.673.000
2	18	04	2,01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	27.350.000				27.350.000
2	18	04	2,01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	19.026.800				19.026.800
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
2	18	05	2,01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
2	18	05	2,01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	9.632.000				9.632.000
2	18	05	2,01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	24.000.000				24.000.000
2	18	05	2,01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	7.500.000				7.500.000
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
2	18	06	2,01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
2	18	06	2,01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	13.568.000				13.568.000
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
2	18	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
2	18	01	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.084.000				27.084.000
2	18	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
2	18	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.214.672.689				3.214.672.689
2	18	01	2,02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	151.320.000				151.320.000
2	18	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
2	18	01	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35.750.000				35.750.000
2	18	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					
2	18	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.399.000				7.399.000
2	18	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan	65.748.600				65.748.600

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Belanja				Jumlah
						Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
2	18	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.900.000				33.900.000
2	18	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.182.800				19.182.800
2	18	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.800.000				13.800.000
2	18	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310.278.950				310.278.950
2	18	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
2	18	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000	5.000.000			50.000.000
2	18	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
2	18	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000				2.000.000
2	18	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	625.560.000				625.560.000
2	18	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
2	18	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.320.000				76.320.000
2	18	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.112.000				47.112.000
2	18	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.700.000				30.700.000
2	18	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.025.000				50.025.000
Jumlah						5.060.152.839	5.000.000			5.065.152.839

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 900/1575/BKAD/2023 dan Nomor : 900.1.1/478/DPRD/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024, Pagu Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.065.152.839 dengan rincian anggaran sebagai berikut :

- Plafon Anggaran RKA-SKPD sebesar Rp5.065.152.839
- Plafon Anggaran KUA-PPAS sebesar Rp5.065.152.839

Kode	Program/ Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
2,18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.065.152.839,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	5.065.152.839,00
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	10.100.000,00
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.100.000,00
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenal Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	10.100.000,00

Kode	Program/ Kegiatan	Piafon Anggaran Sementara (Rp.)
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	130.100.000,00
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	130.100.000,00
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	80.100.000,00
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	109.399.800,00
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	109.399.800,00
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	27.350.000,00
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	35.673.000,00
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	27.350.000,00
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	19.026.800,00
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	41.132.000,00
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	41.132.000,00
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	9.632.000,00
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	24.000.000,00
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	7.500.000,00
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	13.568.000,00
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.568.000,00
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	13.568.000,00
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.760.853.039,00
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.084.000,00
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.084.000,00
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.365.992.689,00
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.214.672.689,00
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	151.320.000,00
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.750.000,00
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35.750.000,00
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	450.309.350,00
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.399.000,00
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.748.600,00
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.900.000,00
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.182.800,00
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.800.000,00
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310.278.950,00
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000,00
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	627.560.000,00
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	625.560.000,00
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.157.000,00
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.320.000,00
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.112.000,00
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.700.000,00
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.025.000,00
TOTAL		5.065.152.839,00

Uraian Catatan Hasil Reviu

1. Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Dalam Pelaksanaan Reviu RKA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2024.

Kesimpulan:

Berdasarkan dokumen Pendukung yang disampaikan dalam Pelaksanaan Reviu RKA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2024 masih belum dilengkapi dengan dokumen *Term Of Reference* (TOR) per sub kegiatan.

2. Pengujian pemenuhan kriteria terhadap penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru pada RKA SKPD yang tidak terdapat dalam PPAS.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, tidak ada penambahan kegiatan atau sub kegiatan baru pada RKA SKPD yang tidak terdapat dalam PPAS. Seluruh kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada RKA SKPD **telah sesuai** dengan PPAS.

Terdapat total 6 program, 12 kegiatan dan 28 sub kegiatan pada RKA SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2024.

3. Pengujian atas kewajaran alokasi anggaran pendapatan daerah

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa pada RKA SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2024 **tidak ada** alokasi anggaran pendapatan daerah.

4. Pengujian atas kewajaran alokasi anggaran belanja daerah

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa :

- a. Jumlah belanja operasi dalam RKA SKPD telah sesuai dengan KUA PPAS
- b. Semua belanja operasi dan belanja modal belum dilengkapi dengan dokumen *Term Of Reference* (TOR), sehingga tidak diketahui landasan, tujuan dan rincian kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Ada beberapa belanja pemeliharaan yang jumlah pemeliharaannya tidak berpedoman pada kebutuhan pemeliharaan BMD yang disetujui pada Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku pengelola barang tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Pemeliharaan		Selisih
		RKA	RKBMD	
1	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : AC Split	20 Unit	0 Unit	20 Unit

- d. Kegiatan pemeliharaan gedung kantor tidak dilengkapi dengan TOR/KAK
- e. Ada beberapa belanja modal yang jumlahnya tidak berpedoman pada Rencana Kebutuhan Barang yang disetujui pada Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku pengelola barang tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Belanja Modal		Selisih
		RKA	RKBMD	
1	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Gorden	10 Meter	0 Meter	10 Meter

- 5. Pengujian atas kewajaran alokasi anggaran pembiayaan daerah

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa pada RKA SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu **tidak ada** alokasi anggaran pembiayaan daerah.

- 6. Pengujian atas efektif, efisien dan ekonomis penganggaran

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa pada RKA SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2024 ada beberapa jenis belanja yang sama tetapi disebar pada beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

NO	RINCIAN				CATATAN REVIU					KET
					BELANJA (Rp)					
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ALOKASI	MAKAN MINUM	SPPD	HONOR	ATK	LAIN-LAIN	
1	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000,00	400.000				3.360.000	- Belanja makan minum rapat a disatukan pada sub kegiatan penyediaan logistik kantor
					1.200.000				896.000	- Belanja alat/bahan unt kegiatan kanto bahan cetak ag disatukan pada sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengganda
									4.144.000	
2	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Rp 9.632.000,00	1.200.000				1.344.000	- Belanja makan minum rapat a disatukan pada sub kegiatan penyediaan logistik kantor
					3.600.000				1.200.000	- Belanja alat/bahan unt kegiatan kanto bahan cetak ag disatukan pada sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengganda
									2.288.000	

NO	RINCIAN				CATATAN REVIU					KET
					BELANJA (Rp)					
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ALOKASI	MAKAN MINUM	SPPD	HONOR	ATK	LAIN-LAIN	
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Rp 35.673.000,00	2.600.000			1.149.000		- Belanja makan minum rapat a disatukan pada sub kegiatan penyediaan logistik kantor
					1.950.000				470.000	- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor agar disatukan pada sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
					1.000.000				11.200.000	- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak agar disatukan pada sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengganda
					3.000.000				1.304.000	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp 13.568.000,00	600.000				2.000.000	- Belanja makan minum rapat a disatukan pada sub kegiatan penyediaan logistik kantor
					1.800.000				1.344.000	- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak agar disatukan pada sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengganda
									1.344.000	
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penanaman Modal	Rp 7.500.000,00	450.000				1.120.000	- Belanja makan minum rapat a disatukan pada sub kegiatan penyediaan logistik kantor
					1.350.000				1.120.000	- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak agar disatukan pada sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengganda
									2.116.000	
									1.344.000	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Rp 10.100.000,00	1.000.000				1.344.000	- Belanja makan minum rapat a disatukan pada sub kegiatan penyediaan logistik kantor
					3.000.000				500.000	- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak agar disatukan pada sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengganda

NO	RINCIAN				CATATAN REVIU					KET
					BELANJA (Rp)					
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ALOKASI	MAKAN MINUM	SPPD	HONOR	ATK	LAIN-LAIN	
7	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Rp 19.026.800,00	600.000				1.344.000	- Belanja makan minum rapat agenda disatukan pada sub kegiatan penyediaan logistik kantor
					1.800.000				282.800	- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak agenda disatukan pada sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
									7.500.000	
									7.500.000	
		Jumlah			25.550.000	-	-	1.149.000	59.320.800	

7. Rekomendasi

Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat merekomendasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar:

1. Melengkapi dokumen pendukung RKA SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2024 dengan *Term Of Reference* (TOR) per sub kegiatan, sehingga penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai kurang tergambar dengan jelas.
2. Menyatukan belanja-belanja yang sejenis kedalam kegiatan yang relevan, agar tercapai efektifitas dari penganggaran yang berdampak pada efisiensi belanja non operasional.
3. Anggaran belanja pemeliharaan jumlahnya berpedoman pada kebutuhan pemeliharaan BMD yang disetujui pada Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Pengelola Barang tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.
4. Anggaran belanja modal jumlahnya berpedoman pada kebutuhan BMD yang disetujui pada Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Pengelola Barang tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

5. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dilengkapi dengan dokumen TOR dan RAB.

KualaTungkal, 6 September 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Penanaman Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Wakil Penanggung Jawab



EKO SUWELLO, ST.
NIP. 19741022 200501 1 010